

# Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

## Pendidikan Multikultural Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Abdulah
Publisher	Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-07 10:34:11
Link to Item	<a href="http://hdl.handle.net/20.500.12424/162364">http://hdl.handle.net/20.500.12424/162364</a>

## **Pendidikan Multikultural Berbasis Nilai-Nilai Pancasila**

**Oleh: Abdulah<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

Nilai pancasila merupakan topik sentral yang memiliki peran strategis dalam pendidikan multikultural. Namun demikian modus dan isi pembelajaran nilai pancasila yang ada di satuan pendidikan selama ini menunjukkan fenomena yang kurang menghargai dan mengeksplorasi nilai-nilai multikultural berbasis kearifan lokal (*local genius*). Pendidikan nilai-nilai pancasila dapat menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum Indonesia untuk mengembangkan kompetensi dan ketrampilan hidup (*life skills*) di tengah masyarakat Indonesia yang multikultur dan mencakup berbagai macam perspektif budaya yang berbeda terutama dalam bingkai kearifan lokal.

Tulisan ini mengkaji bagaimana penguatan dan aktualisasi nilai pancasila melalui pendidikan multikultural dan pengembangan kurikulum pendidikan multikultural berbasis nilai-nilai pancasila. Harapannya tulisan ini dapat berkontribusi dalam membentuk peserta didik yang dapat berinteraksi dengan berbagai pihak yang memiliki keberagaman latar belakang sosial budaya dan memiliki kesadaran akan semangat persatuan dalam wadah NKRI.

**Kata Kunci:** Pendidikan Multikultural dan Nilai Pancasila.

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Supervisi Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

## A. Pendahuluan

Belakangan ini, bangsa Indonesia menghadapi persoalan disintegrasi yang serius karena konflik dan tindak kekerasan horisontal terjadi di berbagai daerah seperti Maluku, Papua, dan Sulawesi, dan tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi merambah sampai ke peserta didik sehingga menimbulkan disharmoni peserta didik. Seperti dinyatakan oleh Suparno dkk (2002: 5) bahwa beberapa tahun terakhir sering terjadi tawuran antar peserta didik dan konflik antar peserta didik sekolah. Disharmoni sosial berpangkal pada ketidakmampuan memaknai perbedaan terutama pada aspek budaya, bahasa, gender, etnis, dan agama. Pada level peserta didik, disharmoni dipicu oleh perbedaan gagasan, cara berfikir, prestasi, minat, dan bakat. Akibatnya, muncul sikap subjektif, tidak menghargai, meremehkan, memaksakan kehendak, merasa paling benar, suka menyalahkan, egois, kecewa, dan marah apabila pendapatnya tidak diterima.

Peserta didik perlu untuk mempelajari kebudayaan kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan harus membangun kesadaran yang mendalam bagi peserta didik untuk menghargai dan menjunjung tinggi adanya berbagai perbedaan, antara lain realitas keberadaan berbagai macam etnis, suku bangsa, bahasa, dan kultur masyarakat sehingga memerlukan keberadaan sistem dan praktek pendidikan yang bersifat adil setara sehingga semua peserta didik tanpa melihat latar belakangnya bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak untuk mencapai prestasi optimal (Zamroni, 2011: 33).

Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*) yang didalamnya mencakup nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media bagi pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*) di tengah heterogenitas dan pluralisme yang menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki ragam perbedaan dan menjadi kekayaan manusia Indonesia. Hal ini terlihat pada perbedaan suku, budaya, adat-istiadat, agama, ras, gender, strata sosial dan golongan aliansi politik sangat jelas melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Pluralitas menjadi sebuah realita dan mesti diterima sebagai kekayaan nasional bangsa Indonesia. Di tengah banyak perbedaan tersebut, sebagai suatu kesatuan

nasional bangsa Indonesia harus hidup dan bergaul agar integritas nasional tetap terjaga. Implikasi logisnya adalah perlu membangun sikap inklusif, pluralis, toleran dan saling berdampingan dengan cinta dan perdamaian.

Kemajemukan atau heterogenitas bangsa Indonesia yang langka dimiliki oleh negara lain tersebut, menjadi modal sosial dengan konstruksi budayanya yang berbasis kearifan lokal (*local genius*). Heterogenitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab tentunya harus dijaga dan dilestarikan sebagai khasanah budaya nasional. Dalam konteks interaksi sosial baik secara horizontal maupun vertikal realita pluralitas tersebut, dibutuhkan instrumen pendidikan yang berkarakter terbuka, inklusif, toleran dan pluralis. Pada konteks ini terminologi pendidikan multikultural menjadi istilah yang relevan untuk dikembangkan dalam ranah pendidikan Indonesia sebagai bangsa yang plural.

Menurut Yaqin (2007:25) pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para peserta didik seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pada konteks ini Pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila merupakan topik sentral sebagai wahana pengembangan dan desiminasi pendidikan multikultural dalam masyarakat yang pluralis seperti Indonesia.

Pendidikan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum Indonesia untuk mengembangkan kompetensi dan ketrampilan hidup (*life skills*), di tengah masyarakat Indonesia yang multikultur dan mencakup berbagai macam perspektif budaya yang berbeda terutama dalam bingkai kearifan lokal. Persoalannya adalah bentuk pendidikan multikultural apa yang sesuai untuk situasi dan kondisi Indonesia pasca reformasi? Persoalan utama dalam pendidikan Pancasila di sekolah adalah pada belum adanya model Pendidikan nilai-nilai Pancasila yang dapat meningkatkan kompetensi multikultural peserta didik dan begitu rendahnya kesadaran multikultural warga negara yang dibangun atas dasar nilai-nilai kearifan lokal dalam fenomena sosial pasca reformasi sebagai upaya memperkokoh integrasi bangsa dalam konsepsi Bhinneka tunggal ika.

Rasional tentang pentingnya pendidikan multikultural, karena strategi pendidikan ini dipandang memiliki keutamaan-keutamaan, terutama dalam: (1) memberikan terobosan baru pembelajaran yang mampu meningkatkan empati dan mengurangi prasangka siswa atau mahasiswa sehingga tercipta manusia (warga negara) antarbudaya yang mampu menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan (nonviolent); (2) menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang potensial dalam mengedepankan proses interaksi sosial dan memiliki kandungan afeksi yang kuat; (3) model pembelajaran multikultural membantu guru dalam mengelola proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif, terutama memberikan kemampuan peserta didik dalam membangun kolaboratif dan memiliki komitmen nilai yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk; (4) memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia dalam penyelesaian dan mengelola konflik yang bernuansa SARA yang timbul di masyarakat dengan cara meningkatkan empati dan mengurangi prasangka.

Kondisi keberagaman masyarakat dan budaya, secara positif menggambarkan kekayaan potensi sebuah masyarakat yang bertipe pluralis, namun secara negatif orang merasa tidak nyaman karena tidak saling mengenal budaya orang lain. Setiap etnik atau ras cenderung mempunyai semangat dan ideologi yang etnosentris, yang menyatakan bahwa kelompoknya lebih superior daripada kelompok etnik atau ras lain (Jones, dalam Liliweri, 2003). Terjadinya tidak saling mengenal identitas budaya orang lain, bisa mendorong meningkatnya prasangka terhadap orang lain, berupa sikap antipati yang didasarkan pada kesalahan generalisasi yang diekspresikan sebagai perasaan. Prasangka juga diarahkan kepada sebuah kelompok secara keseluruhan, atau kepada seseorang hanya karena itu adalah anggota kelompok tertentu. Secara demikian, prasangka memiliki potensi dalam mengambinghitamkan orang lain melalui stereotipe, diskriminasi dan penciptaan jarak sosial.

Melalui pembelajaran multikultural, subyek belajar dapat mencapai kesuksesan dalam mengurangi prasangka dan diskriminasi (Banks, 1996). Dengan kata lain, variabel sekolah terbentuk dimana besar kelompok rasial dan etnis yang memiliki pengalaman dan hak yang sama dalam proses pendidikan. Peserta didik

mampu mengembangkan keterampilannya dalam memutuskan sesuatu secara bijak. Mereka lebih menjadi suatu subjek dari pada menjadi obyek dalam suatu kurikulum. Mereka menjadi individu yang mampu mengatur dirinya sendiri dan merefleksi kehidupan untuk bertindak secara aktif. Mereka membuat keputusan dan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan konsep, pokok-pokok masalah yang mereka pelajari. Mereka mengembangkan visi sosial yang lebih baik dan memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan serta mengkonstruksinya dengan sistematis dan empatis. Seharusnya guru mengetahui bagaimana berperilaku terhadap para pelajar yang bermacam-macam kulturnya di dalam kelas. Mereka mengetahui perbedaan-perbedaan nilai-nilai dan kultur dan bentuk-bentuk perilaku yang beraneka ragam.

## **B. Pembahasan**

### **1. Konsep Pendidikan Multikultural**

Konsep pendidikan multikultural di negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada, bukan hal baru lagi. Mereka telah melaksanaka didikannya khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam, yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional (Said Aqil Husin Almunawar, 2003: 210).

Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman etnik dan budaya masyarakat suatu bangsa, sebagaimana dikatakan R. Stavenhagen (1996: 213)

*Religious, linguistic, and national minoritas, as well as indigenous and tribal peoples were often subordinated, sometimes forcefully and against their will, to the interest of the state and the dominant society. While many people... had to discard their own cultures, languages, religions and traditions, and adapt to the alien norms and customs that were consolidated and reproduced through national institutions, including the educational and legal system.*

Sedangkan konsep tentang pendidikan multikultural, secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai “pendidikan untuk/tentang

keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan”.

Hal ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire (2000: 130), pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya, harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.

Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa (Hilliard, 1991-1992). Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh peserta didik tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial dan agama (Nita E. Woolfolk, 1998: 189).

Menurut Tilaar, pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” se usai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran “interkulturalisme” ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa (H. A. R, Tilaar, 2002: 497).

Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau *mainstream*. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya *mainstream* yang dominan,

yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstream*. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau “*politics of recognition*” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “*indifference*” dan “*Non-recognition*” tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang “*ethnic studies*” untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan *disadvantaged*.

Istilah “pendidikan multikultural” dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek-subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.

## 2. Nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural

Pengembangan masyarakat multikultural yang demokratis menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia yang ditandai oleh kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas), karena multikultural pada dasarnya menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat, dan mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada, baik secara individual maupun secara kelompok dalam sebuah masyarakat. Masyarakat multikultural yang demokratis di Indonesia yang sehat tidak bisa dibangun secara *taken for granted* atau *trial and error*, sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, pragmatik, *integrated* dan berkesinambungan. Salah satu strategi dan wadahnya adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan di sini adalah Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas (*citizenship education*) yang memiliki perspektif kewarganegaraan dunia abad ke-21 yang terkenal dengan sebutan kewarganegaraan multidimensi yang salah satu cirinya memiliki karakteristik multikultural (Cogan, 1998:116).

Menurut Winataputra (2008: 30), Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai *multicultural nation-state* dalam konteks negara kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai *monocultural nation state*. Hal itu dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan pada setiap jamannya itu.

Lebih lanjut menurut Winataputra (2008:31) pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia, secara filosofik dan substantif-pedagogis andragogis, merupakan pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang religius, berkeadaban, berjiwa persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab, dan

berkeadilan, serta mampu hidup secara harmonis dalam konteks multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks yang demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan masyarakat multikultural.

Namun demikian kenyataan praksis di lapangan Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah yang merupakan ujung tombak dan bagian dari proses membangun cara hidup multikultural untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan penghargaan akan keragaman justru belum menggembirakan, mulai kehilangan dimensi multikulturalnya, bahkan kehilangan aktualisasinya karena terjebak pada penguasaan pengetahuan (*knowledge*) belaka dengan membiarkan aspek afeksi (*attitude*) pendidikannya. Peserta didik PKn umumnya dilakukan secara parsial dan tidak mengakomodir nilai-nilai multikulturalisme dan kearifan lokal masyarakat setempat. Padahal seharusnya PKn sebagai wahana pendidikan multikultural dapat mengembangkannya secara lebih sistematis dan komprehensif.

### **3. Pendidikan Multikultural Berbasis Nilai-nilai Pancasila**

Sila “Persatuan Indonesia” dalam Pancasila memberikan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks masyarakat yang plural dan multikultural. Dalam situasi ini, warga negara diharapkan memiliki pengetahuan, sikap, dan tindakan yang menempatkan nilai-nilai persatuan dalam keberagaman. Suatu tuntutan yang kadang tidak mudah diwujudkan karena ada tegangan antara keinginan untuk menunjukkan keunggulan dan karakter identitas lokal/daerah dan tuntutan untuk tetap dalam koridor NKRI yang menempatkan identitas nasional sebagai penciri bersama yang harus tampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks tersebut, diperlukan karakter yang mampu mensintesis dua kepentingan tersebut tanpa melunturkan masing-masing identitas.

Pembangunan karakter tersebut dapat dimulai di lingkup satuan pendidikan dengan cara; (1) mengintegrasikan nilai-nilai dalam semua mata pelajaran, (2) mengembangkan budaya tertentu yang dapat

menumbuhkembangkan nilai-nilai di tingkat satuan pendidikan, (3) melaksanakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan (4) membiasakan perilaku mengarah pada tercapainya karakter tertentu dalam kehidupan sekolah (Kebijakan Nasional, 2010). Keempat cara tersebut dapat dilakukan secara simultan dengan perencanaan yang sistematis dan implementasi yang berkelanjutan.

Pendidikan multikultural yang sesuai dengan esensi sila ke-3 Pancasila yang dapat dikembangkan di tingkat satuan pendidikan dengan cara-cara di atas adalah individu yang memiliki perspektif multikultural. Pendidikan multikultural ini mutlak untuk dibangun dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, golongan, dan budaya, tetapi harus tetap dalam kerangka NKRI. Spirit multikultural ini harus selalu dihidupkan dalam proses pendidikan agar semangat persatuan Indonesia dapat tetap eksis di masyarakat Indonesia. Terdapat tiga faktor utama perlunya pendidikan didasarkan pada semangat multikultural yaitu; (1) pluralisme etnik merupakan realitas sosial yang sedang berkembang saat ini dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, (2) setiap individu memerlukan pengetahuan dan kepercayaan tentang etnik dan kelompok etnik lain, (3) kepercayaan dan pengetahuan tentang etnik dan kelompok budaya membatasi perspektif banyak orang dan membuat suatu perbedaan (Banks, 1993).

Realitas masyarakat Indonesia yang beragam harus disikapi dengan karakter yang mengedapankan semangat persatuan bangsa dan Negara, alih-alih kepentingan individu, kelompok, dan antargolongan. Untuk itu, setiap individu perlu memiliki pengetahuan, wawasan, dan perspektif mengenai identitas etnik mereka sekaligus identitas etnik lain agar terjadi kesepahaman. Salah satu cara memperoleh pengetahuan, wawasan, dan perspektif tersebut adalah melalui peserta didik di satuan pendidikan. Dengan pendidikan dan pembelajaran, orang akan semakin terbuka dan luas perspektifnya dalam memaknai realitas yang plural tersebut. Motto *Bhineka Tunggal Ika* sebenarnya mengakomodasi atas keragaman dalam masyarakat bangsa Indonesia dalam suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan agama. Ironisnya keragaman dalam kesatuan budaya bangsa

dalam perjalanan kemerdekaan negara dan bangsa lebih ditekankan pada aspek kesamaan untuk membentuk solidaritas bangsa. Implikasinya, budaya lokal yang kaya dengan perbedaan banyak mengalami erosi atau pengikisan baik secara kuantitas maupun kualitas terutama penggunaan bahasa daerah mengalami kemunduran maupun kehilangan daya gunanya secara pragmatik (Wiriaatmadja, 2002: 221).

Pendidikan multikultural merupakan proses atau strategi pendidikan dalam konteks pluralitas budaya yang melibatkan lebih dari satu budaya, yang ditunjukkan melalui keberagaman kebangsaan, bahasa, etnik, atau kriteria rasial. Proses dan strategi ini, dalam konteks pembelajaran, hendaknya dialami oleh peserta didik agar mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga ketika berinteraksi dengan peserta didik atau pihak lain yang memiliki hal-hal yang berbeda. Arah pendidikan multikultural adalah terwujudnya pengetahuan, kesadaran, dan sikap toleransi dalam diri peserta didik dalam koridor keberagaman kultural, perbedaan dan persamaan antarbudaya, pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap yang berbeda-beda. Untuk semakin membumikan nilai-nilai multikultural dalam rangka mewujudkan persatuan indonesia, perlulah kiranya memasukkan nilai-nilai pancasila dalam kurikulum di satuan pendidikan.

#### **4. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Multikultural Berbasis Nilai-nilai Pancasila**

Kurikulum di tingkat satuan pendidikan seharusnya merefleksikan pola peserta didikan multibudaya dan mengakomodasi keberagaman karakteristik peserta didikannya dan masyarakat (sekolah). Peserta didik memiliki keunikan budaya dan karakteristik etnik yang berbeda-beda sehingga harus direspon secara positif dalam proses belajar dengan aktivitas kooperatif agar mereka mampu mengembangkan sikap positif terhadap perbedaan etnik dan budaya.

Budaya sekolah hendaknya direstrukturisasi dan dikondisikan untuk merefleksikan perbedaan budaya. Program instruksionalnya pun hendaknya mengakomodasi tipe belajar peserta didik yang berasal dari bermacam etnik dan

kelompok etnik yang berbeda. Kurikulum yang dijiwai semangat multikultural senantiasa membantu peserta didik untuk menyadari dan mampu memanfaatkannya dalam kehidupan mereka.

Kurikulum multikultural hendaknya menyediakan kesempatan terus menerus bagi peserta didik untuk mengembangkan konsep diri yang lebih baik. Perkembangan ini merupakan proses yang berlangsung terus menerus mulai dari awal masuk mengikuti peserta didikan di sekolah. Untuk itu program peserta didikan harus dirancang dengan baik agar proses ini tetap terjaga. Rancangan tersebut diarahkan pada pengembangan *self-identity*, *self concept*, dan *self understanding*.

Secara lebih konkrit, Banks (2002: 13) mengidentifikasi ada lima dimensi pendidikan yang menjadi acuan penting dalam pengembangan kurikulum yang berbasis multikultural.

- a. Dimensi integrasi isi/materi (*content integration*). Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan ‘poin kunci’ pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Salah satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru bekerja ke dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak dirubah. Dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural.
- b. Dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*). Suatu dimensi dimana para guru membantu peserta didik untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri.

- c. Dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*). Guru melakukan banyak usaha untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika peserta didik-peserta didik masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu peserta didik mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus. Penelitian menunjukkan bahwa para pelajar yang datang ke sekolah dengan banyak stereotype, cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan kesalahpahaman terhadap kelompok etnik dan ras dari luar kelompoknya. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan teksbook multikultural atau bahan pengajaran lain dan strategi pembelajaran yang kooperatif dapat membantu para pelajar untuk mengembangkan perilaku dan persepsi terhadap ras yang lebih positif. Jenis strategi dan bahan dapat menghasilkan pilihan para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras luar, etnik dan kelompok budaya lain.
- d. Dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*). Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah peserta didik dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (*cooperative learning*), dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif (*competition learning*). Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar.

e. Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya peserta didik yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya peserta didik yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan staf dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah.

Pencapaian tujuan-tujuan kurikulum dalam berbagai dimensi di atas diarahkan pada terejawantahnya nilai persatuan Indonesia. Pencapaian ini harus didukung dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki pengajar agar mereka dapat membantu peserta didik dalam proses pembentukan karakter. Menurut Banks (1989: 104), kompetensi multikultural yang harus dimiliki guru, yaitu; (1) sensitif terhadap perilaku etnik para peserta didik, (2) sensitif terhadap kemungkinan adanya kontroversi tentang materi ajar, dan (3) menggunakan teknik peserta didikan kelompok untuk mempromosikan integrasi etnik dalam peserta didikan.

### **C. Penutup**

Pendidikan multikultural yang berpusat pada nilai-nilai pancasila hendaknya harus diupayakan dengan berbagai cara dan melibatkan berbagai pihak. Sosialisasi/penyadaran, pendidikan, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama harus dilakukan dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan media masa. Satuan pendidikan dapat mengambil peran dalam pendidikan multikultural yang berdasarkan pada sila-sila pancasila, khususnya sila ke-3 dengan mengembangkan pembelajaran yang berbasis pada multikulturalisme yang menekankan pada upaya merencanakan dan melaksanakan pendidikan yang mengedepankan semangat persatuan dalam berbagai bentuk keberagaman budaya dan konteks sosial.

Pembelajaran yang mengakomodasi berbagai aspek multikultural diharapkan mampu menumbuhkan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik berkaitan dengan semangat persatuan Indonesia. Dengan demikian, peserta didik dapat interaksi dengan berbagai pihak yang memiliki keberagaman latar belakang sosial budaya dengan tetap dalam kesadaran dan semangat persatuan dalam wadah NKRI. Peserta didik dikondisikan hidup dalam keberagaman tetapi tetap bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar Pancasila dan UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banks, James A. (1993). *Multikultural Education: Historical Development, Dimension, and Practice*. Review of Research Education
- \_\_\_\_\_. (2002). *An Introduction to Multikultural Education*. Boston: Allyn and Bacon Press.
- \_\_\_\_\_. (ed). (1989). *Multikultural Education: Issues and Perspectives*. Boston: Allyn and Bacon Press.
- Cogan, J.J. dan Derricot, R. (1998). *Citizenship for the 21<sup>st</sup> Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.
- H. A. R. Tilaar. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Liliweri, Alo. (2005). *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta. LKiS.
- Nita E. Woolfolk. (1998). *Educational Psychology: Seventh Edition*. The Ohio State University
- Paulo Freire. (2000). *Pendidikan Pembebasan*. Jakarta: LP3S
- Said Aqil Husin al-Munawwar. (2003). *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press. Cet. I
- Stavenhagen, Rodolfo. (1996). "Education for a Multikultural world", in Jasque Delors (et all). *Learning: the treasure within*. Paris: UNESCO
- Suparno, Paul dkk. (2002). *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Winataputra. U.S. (2008). *Multikulturalisme Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembanguan Karakter Bangsa Indonesia Dalam Dialog Multikultural*. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI.
- Wiriaatmadja, Rochiati (2002). *Pendidikan Sejarah di Indonesia: Perspektif Lokal, Nasional, dan Global*, Bandung: Historia Utama Press.
- Yaqin, Ainul. (2007). *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Zamroni. (2011). *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama